

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

PERGADAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| Draft Peraturan | | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Batang Tubuh | Penjelasan |
| Menimbang: |  |  |  |
| bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 106 ayat (6), Pasal 113 ayat (4), Pasal 114 ayat (3), Pasal 115 ayat (5), Pasal 116 ayat (3), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (4), Pasal 128 ayat (4), Pasal 252 ayat (4), Pasal 269, dan Pasal 282 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pergadaian; |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembengan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERGADAIAN. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 1 | Cukup jelas |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. Pergadaian adalah kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak. |  |  |  |
| 1. Perusahaan adalah perusahaan pergadaian dan perusahaan pergadaian syariah. |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian adalah badan usaha yang melakukan Pergadaian secara konvensional. |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian Syariah adalah badan usaha yang melakukan seluruh Pergadaian berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Modal Disetor adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki jumlah nominal saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah  melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota DPS, serta pegawai Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |  |  |  |
| 1. Afiliasi adalah:    1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan;    2. hubungan dengan Perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;    3. hubungan pengendalian dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;    4. hubungan kepemilikan saham dalam Perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau    5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. |  |  |  |
| 1. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan. |  |  |  |
| 1. Jaminan adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Penaksir adalah orang yang memiliki sertifikat keahlian untuk melakukan penaksiran atas nilai Jaminan dalam transaksi Gadai. |  |  |  |
| 1. Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai yang ditandatangani oleh Perusahaan dan nasabah. |  |  |  |
| 1. Surat Bukti Fidusia adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan berdasarkan fidusia yang ditandatangani oleh Perusahaan dan nasabah. |  |  |  |
| 1. Pinjaman adalah uang yang dipinjamkan oleh Perusahaan kepada nasabah. |  |  |  |
| 1. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima Pinjaman dengan jaminan berupa Jaminan dan/atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Lelang adalah penjualan Jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. |  |  |  |
| 1. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Jaminan dikurangi dengan jumlah Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut. |  |  |  |
| 1. Asosiasi adalah asosiasi Perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat penunjukan asosiasi dari Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. |  |  |  |
| 1. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. |  |  |  |
| 1. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. |  |  |  |
| 1. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan atau lebih. |  |  |  |
| 1. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan setelah pencabutan izin usaha Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi. |  |  |  |
| 1. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. |  |  |  |
| 1. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari usaha pergadaian. |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, dan manajemen. |  |  |  |
| 1. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman yang selanjutnya disingkat BMPP adalah batasan tertentu dalam pemberian pinjaman yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha Perusahaan dan Pembubaran. |  |  |  |
| 1. Pembubaran adalah proses pengakhiran status badan hukum Perusahaan setelah pencabutan izin usaha Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi, yang dibentuk oleh RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| KELEMBAGAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |  |  |
| Bentuk badan hukum Perusahaan adalah: |  |  |  |
| * 1. perseroan terbatas; atau |  |  |  |
| * 1. koperasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 3 |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sahamnya dapat dimiliki oleh: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. negara Kesatuan Republik Indonesia; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pemerintah daerah; | Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah DaerahProvinsiatau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |  |  |
| 1. warga negara Indonesia; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
| 1. badan hukum Indonesia | Cukup jelas. |  |  |
| 1. badan hukum asing; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
| 1. warga negara asing. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan kepemilikan untuk Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kepemilikan badan hukum asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan bersama: 2. pemerintah; 3. pemerintah daerah; 4. warga negara Indonesia; dan/atau 5. badan hukum Indonesia. |  |  |  |
| 1. Kepemilikan warga negara asing hanya dapat dilakukan melalui transaksi di pasar modal. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 5 |  |  |  |
| 1. Modal Disetor Perusahaan ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. | Penentuan “lingkup wilayah usaha” berdasarkan wilayah yang sesuai dengan keberadaan kantor pusat Perusahaan. |  |  |
| 1. Modal Disetor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; |  |  |  |
| * 1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha provinsi; atau |  |  |  |
| * 1. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), untuk lingkup wilayah usaha nasional. |  |  |  |
| 1. Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor secara tunai dan penuh atas nama Perusahaan pada: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian; atau |  |  |  |
| 1. bank umum syariah atau atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian Syariah. |  |  |  |
| 1. Sumber dana penyertaan kepada Perusahaan dilarang berasal dari: | Yang dimaksud dengan “sumber dana penyertaan” adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas atau modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengenai koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. |  |  |
| * + 1. berasal dari pinjaman; dan |  |  |  |
| * + 1. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 6 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan wajib memenuhi ekuitas minimum sebesar: |  |  |  |
| 1. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; |  |  |  |
| 1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi; dan |  |  |  |
| 1. Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk ruang lingkup usaha nasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 7 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan hanya dapat melakukan penyertaan langsung pada: 2. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/atau 3. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah ekuitas Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Perusahaan Pergadaian yang melakukan penyertaan langsung kepada Perusahaan Pergadaian Syariah hasil pemisahan Perusahaan Pergadaian yang bersangkutan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Pemegang Saham Pengendali |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 8 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak, Perusahaan wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 9 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| PERIZINAN USAHA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 10 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas dalam akta pendirian yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata: |  |  |  |
| 1. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai, bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional; atau |  |  |  |
| 1. Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai diikuti dengan kata syariah, bagi Perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama Perusahaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas maupun perkoperasian. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Perizinan Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 11 |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha Pergadaian wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus dilampiri dokumen berupa: |  |  |  |
| * 1. salinan akta pendirian badan hukum dengan disertai bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah usaha; |  |  |  |
| 1. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. modal disetor; |  |  |  |
| 1. kepemilikan |  |  |  |
| 1. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; |  |  |  |
| * 1. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. daftar anggota pendiri berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. surat pernyataan pemegang saham atau anggota yang menyatakan bahwa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. sumber dana penyertaan tidak berasal dari pinjaman; |  |  |  |
| 1. sumber dana penyertaan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; dan |  |  |  |
| * 1. data anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS: | Cukup jelas. |  |  |
| * + - * 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; |  |  |  |
| * + - * 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak; |  |  |  |
| * + - * 1. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan |  |  |  |
| * + - * 1. surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS yang menyatakan: |  |  |  |
| 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; |  |  |  |
| 1. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; |  |  |  |
| 1. tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pengurus, atau pengawas, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; |  |  |  |
| * 1. data pemegang saham selain PSP atau anggota: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. orang perseorangan, dilampiri dengan: |  |  |  |
| 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor; |  |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak; |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan |  |  |  |
| 1. surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa: |  |  |  |
| 1. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; |  |  |  |
| 1. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; |  |  |  |
| 1. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan |  |  |  |
| 1. tidak pernah menjadi PSP, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pengurus, atau pengawas pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; |  |  |  |
| 1. badan hukum dilampiri dengan: |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dengan pemegang saham; |  |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan |  |  |  |
| 1. data direksi badan hukum, meliputi: |  |  |  |
| fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; |  |  |  |
| fotokopi nomor pokok wajib pajak; |  |  |  |
| daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan |  |  |  |
| surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: |  |  |  |
| 1. pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; |  |  |  |
| 1. pemegang saham tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan; |  |  |  |
| 1. pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; |  |  |  |
| 1. pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan |  |  |  |
| 1. pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; |  |  |  |
| 1. pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan; |  |  |  |
| 1. pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan; |  |  |  |
| * 1. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. bukti setoran tunai dari pemegang saham atau anggota; |  |  |  |
| 1. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada: |  |  |  |
| * + - 1. salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian; atau |  |  |  |
| * + - 1. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian Syariah, |  |  |  |
| yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha: |  |  |  |
| * 1. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. visi, misi, dan strategi bisnis; |  |  |  |
| 1. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: |  |  |  |
| 1. rencana kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. rencana permodalan; |  |  |  |
| 1. rencana pendanaan; |  |  |  |
| 1. rencana pengembangan kantor cabang; | Kantor cabang adalah kantor Perusahaan yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan kegiatan usaha Pergadaian. Sebagai contoh, kantor cabang dimaksud menyelenggarakan Pinjaman berdasarkan hukum Gadai dengan melakukan penaksiran atas jaminan Gadai dan memberikan persetujuan pemberian Pinjaman kepada Nasabah. |  |  |
| 1. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; |  |  |  |
| 1. rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inkulusi keuangan; |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan awal; |  |  |  |
| 1. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depanatas: |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  |  |  |
| 1. laporan laba rugi komprehensif; dan |  |  |  |
| 1. laporan arus kas, |  |  |  |
| beserta asumsi yang digunakan; |  |  |  |
| * 1. sistem dan prosedur kerja; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bukti kesiapan infrastruktur antara lain berupa: |  |  |  |
| 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*) beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar aset tetap dan inventaris; | Yang dimaksud engan “inventaris” antara lain:   1. lemari besi/kluis; 2. alat uji emas; dan 3. komputer |  |  |
| 1. contoh Surat Bukti Gadaiatau Surat Bukti Fidusia; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. infrastruktur sistem informasi; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. kelayakan sistem manajemen risiko; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing, paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan |  |  |  |
| 1. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya; |  |  |  |
| * 1. konfirmasi dari otoritas pengawas pihak asing yang bersangkutan untuk Perusahaan yang terdapat penyertaan langsung pihak asing; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Penaksir; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. surat rekomendasi DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, bagi Perusahaan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. fotokopi pedoman penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. fotokopi pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 12 |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap. | Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah lengkap serta memenuhi syarat dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); |  |  |  |
| 1. pemeriksaan setoran modal; |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pergadaian. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan infrastuktur Perusahaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai lingkup wilayah usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 13 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan dilampiri fotokopi Surat Bukti Gadai, Surat Bukti Fidusia, dan/atau surat bukti penitipan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Konversi dari Perusahaan Pergadaian menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 14 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian yang melakukan konversi menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian harus memuat rencana konversi dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga keuangan nonbank. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian wajib mengumumkan rencana konversi dan dampak konversi terhadap Nasabah paling sedikit melalui kantor cabang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan konversi, Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| * 1. bukti pengumuman terkait rencana konversi dan dampak konversi terhadap Nasabah paling sedikit melalui kantor cabang; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. nama berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. maksud dan tujuan Perusahaan Pergadaian Syariah untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| 1. wewenang dan tanggung jawab DPS; |  |  |  |
| * 1. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia serta uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah; | Yang termasuk dalam rencana penyelesaian hak dan kewajiban antara lain rencana penyelesaian portofolio Pergadaian konvensional yang telah dimiliki. |  |  |
| * 1. proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Syariah hasil konversi; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian Syariah, paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. sistem dan prosedur kerja; |  |  |  |
| 1. contoh akad Pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; |  |  |  |
| 1. rencana penyaluran Pinjaman dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan |  |  |  |
| 1. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan atas: |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  |  |  |
| 1. laporan laba rugi komprehensif; dan |  |  |  |
| 1. laporan arus kas, |  |  |  |
| beserta asumsi yang digunakan. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 15 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan Pergadaian untuk memastikan kesiapan infrastuktur Perusahaan Pergadaian Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan konversi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan konversi kepada Perusahaan yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan konversi ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 16 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS atau rapat anggota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan Pergadaian belum melaksanakan RUPS atau rapat anggota yang menyetujui konversi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan konversi yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 17 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan pelaksanaan RUPS atau rapat anggota yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS atau rapat anggota. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS atau rapat anggota yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Perusahaan Pergadaian Syariah hasil konversi; |  |  |  |
| 1. salinan akta perubahan anggaran dasar; |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS atau rapat anggota yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pergadaian Syariah; |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS atau rapat anggota yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi,anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; |  |  |  |
| 1. bukti pengangkatan anggota DPS dan bukti pengesahan Dewan Syariah Nasional tentang penunjukan anggota DPS; |  |  |  |
| 1. pengesahan DPS atas kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS atau rapat anggota yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah hasil konversi. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan: |  |  |  |
| 1. persetujuan atau penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan |  |  |  |
| 1. persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. |  |  |  |
| dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. menetapkan keputusan pemberian izin usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. menerbitkan surat persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk: |  |  |  |
| 1. menetapkan izin usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah, |  |  |  |
| penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 18 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian Syariah hasil konversi wajib melaporkan pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Kantor Pusat dan Kantor Cabang |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 19 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan wajib mencantumkan keterangan atau informasi secara jelas di setiap kantor pusat dan kantor cabang sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. nama dan/atau logo Perusahaan; |  |  |  |
| 1. nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. hari dan jam operasional; dan |  |  |  |
| 1. tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil, dan biaya administrasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 20 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melaporkan pembukaan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan kantor cabang. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan membuka kantor cabang harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| 1. telah mencantumkan rencana pembukaan kantor cabang dalam rencana bisnis; |  |  |  |
| 1. memiliki Tingkat Kesehatan ditetapkan paling rendah sehat; |  |  |  |
| 1. memiliki kecukupan sumber daya manusia; |  |  |  |
| 1. memiliki tempat penyimpanan Jaminan; dan |  |  |  |
| 1. tidak dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dikecualikan untuk pembukaan kantor cabang dalam rangka permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 21 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan wajib melaporkan pemindahan alamat kantor pusat dan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemindahan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 22 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan dilarang membuka atau memindahkan alamat kantor pusat dan kantor cabang di luar lingkup wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat pemekaran wilayah yang menyebabkan kantor cabang berada di lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau provinsi yang berbeda dengan kantor pusat. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 23 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melaporkan penutupan kantor cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan. paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan kantor cabang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan penutupan kantor cabang harus disampaikan dengan melampirkan dokumen yang memuat paling sedikit: |  |  |  |
| 1. dasar pertimbangan penutupan; |  |  |  |
| 1. bukti pengumuman penutupan kantor cabang; dan |  |  |  |
| 1. penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada Nasabah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 24 | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan, pemindahan alamat, dan penutupan kantor cabang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 23 ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 25 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar Pasal 10, ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan/atau Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 26 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| 1. keterbukaan; | Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pergadaian serta standar, prinsip, dan praktik Pergadaian yang sehat. |  |  |
| 1. akuntabilitas; | Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan  pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. |  |  |
| 1. tanggung jawab; | Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik Pergadaian yang sehat. |  |  |
| 1. indepedensi; dan | Yang dimaksud dengan “indepedensi” adalah keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar prinsip, dan praktik Pergadaian yang sehat. |  |  |
| 1. kewajaran. | Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik Pergadaian yang sehat. |  |  |
| 1. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk: |  |  |  |
| 1. mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemangku kepentingan, khususnya Nasabah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; | Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain Nasabah, anggota/pemegang saham, karyawan, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah. |  |  |
| 1. meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; |  |  |  |
| 1. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; |  |  |  |
| 1. penanganan Benturan Kepentingan; |  |  |  |
| 1. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal; |  |  |  |
| 1. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal; |  |  |  |
| 1. penerapan kebijakan remunerasi; |  |  |  |
| 1. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan |  |  |  |
| 1. rencana bisnis. |  |  |  |
| 1. Dalam melakukan kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki standar operasi dan prosedur yang memadai untuk seluruh aktivitas bisnis Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 27 |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” antara lain:   * 1. menambah jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ada dinilai tidak efektif dan efisien; dan   2. menambahkan informasi mengenai transparansi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) oleh anggota Direksi pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dalam hal anggota Direksi dimaksud terbukti melakukan pengendalian. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 28 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku. |  |  |  |
| 1. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: |  |  |  |
| 1. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); dan |  |  |  |
| 1. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. |  |  |  |
| 1. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Direksi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 29 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit: |  |  |  |
| 1. 2 (dua) orang anggota Direksi bagi lingkup wilayah kabupaten/kota; |  |  |  |
| 1. 2 (dua) orang anggota Direksi bagi lingkup wilayah provinsi; atau |  |  |  |
| 1. 3 (tiga) orang anggota Direksi bagi lingkup wilayah nasional. |  |  |  |
| 1. Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya: |  |  |  |
| 1. warga negara indonesia; dan/atau |  |  |  |
| 1. badan hukum Indonesia, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, |  |  |  |
| wajib berkewarganegaraan Indonesia. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi yang berdomisili sesuai dengan lingkup wilayah usaha Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 30 |  |  |  |
| 1. Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif pada perusahaan lain. | Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat Perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.  Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah perusahaan pada industri pergadaian maupun industri nonpergadaian. |  |  |
| 1. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 31 | Cukup jelas. |  |  |
| Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya; |  |  |  |
| 1. mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi; |  |  |  |
| 1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan Nasabah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; dan |  |  |  |
| 1. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 32 | Cukup jelas. |  |  |
| Direksi Perusahaan wajib: |  |  |  |
| 1. mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; |  |  |  |
| 1. mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya; |  |  |  |
| 1. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; |  |  |  |
| 1. memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Nasabah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; |  |  |  |
| 1. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap; dan |  |  |  |
| 1. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan dan DPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 33 | Cukup jelas. |  |  |
| Anggota Direksi Perusahaan dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; 2. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; |  |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan |  |  |  |
| 1. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 34 | Cukup jelas. |  |  |
| Direksi Perusahaan harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Dewan Komisaris |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 35 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi bagi ruang lingkup wilayah kabupaten/kota; |  |  |  |
| 1. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi bagi ruang lingkup wilayah provinsi; atau |  |  |  |
| 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi bagi ruang lingkup wilayah nasional. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili sesuai dengan lingkup wilayah usaha Perusahaan. | Jumlah Dewan Komisaris termasuk komisaris independen. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 36 |  |  |  |
| Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada lebih dari 3 perusahaan lain. | Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah perusahaan pada industri pergadaian maupun industri nonpergadaian. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 37 | Cukup jelas. |  |  |
| Dewan Komisaris Perusahaan wajib: |  |  |  |
| 1. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; |  |  |  |
| 1. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; |  |  |  |
| 1. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; |  |  |  |
| 1. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan |  |  |  |
| 1. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 38 | Cukup jelas. |  |  |
| Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; |  |  |  |
| 1. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; |  |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan |  |  |  |
| 1. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 39 | Cukup jelas. |  |  |
| Anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 40 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 41 | Cukup jelas. |  |  |
| Komisaris Independen Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS, pada Perusahaan yang sama; |  |  |  |
| 1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; |  |  |  |
| 1. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pergadaian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; |  |  |  |
| 1. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; |  |  |  |
| 1. memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan |  |  |  |
| 1. berdomisili di Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 42 | Cukup jelas. |  |  |
| Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 43 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya: |  |  |  |
| 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pergadaian; dan/atau |  |  |  |
| 1. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 44 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 45 | Cukup jelas. |  |  |
| Dewan Komisaris Perusahaan wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
| Pasal 46 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS. |  |  |  |
| 1. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat dalam RUPS atau rapat anggota atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi, pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilakukan setelah memperoleh sertifikasi pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh 1 (satu) atau beberapa Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah secara bersama-sama. |  |  |  |
| 1. Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam akta notaris. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 47 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPS paling sedikit mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi dan mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. DPS wajib melaksanakan tugas pemberian nasihat kepada Direksi dan pengawasan agar kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap: |  |  |  |
| 1. kegiatan Pergadaian berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. pedoman operasional, produk yang dipasarkan, dan praktik pemasaran yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| 1. pengembangan, pengkajian, dan rekomendasi kegiatan usaha Perusahaan yang antara lain mencakup produk, operasional, dan pemasaran. |  |  |  |
| 1. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 48 |  |  |  |
| 1. DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang sama. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya. | Sebagai contoh ketentuan DPS rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu:  A merupakan anggota DPS dari perusahaan pergadaian syariah O.  A rangkap jabatan sebagai:   * DPS pada perusahaan pergadaian P; * DPS pada perusahaan asuransi syariah Q; * DPS pada bank umum syariah R; dan * anggota Dewan Komisaris pada perusahaan penjaminan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 49 | Cukup jelas. |  |  |
| DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: |  |  |  |
| 1. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional; |  |  |  |
| 1. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; |  |  |  |
| 1. mendahulukan kepentingan Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi; |  |  |  |
| 1. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya; dan |  |  |  |
| 1. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 50 | Cukup jelas. |  |  |
| DPS dan Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51 | Cukup jelas. |  |  |
| Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 52 | Cukup jelas. |  |  |
| Anggota DPS dilarang: |  |  |  |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat; |  |  |  |
| 1. memanfaatkan jabatannya sebagai DPS tempat anggota DPS dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat; dan |  |  |  |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 53 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keenam |  |  |  |
| Tenaga Kerja Asing |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 54 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan tenaga kerja asing. |  |  |  |
| 1. Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipekerjakan selain sebagai: |  |  |  |
| 1. Direksi pada bidang tugas tertentu; atau |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 55 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| 1. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia; dan |  |  |  |
| 1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk keimigrasian. |  |  |  |
| 1. Penggunaan tenaga kerja asing sebagai Direksi dilarang lebih dari 1 (satu) anggota Direksi. |  |  |  |
| 1. Penggunaan tenaga kerja asing sebagai Dewan Komisaris dilarang lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 56 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Calon tenaga kerja asing yang akan menduduki jabatan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketujuh |  |  |  |
| Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota DPS |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 57 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan perubahan: |  |  |  |
| 1. anggota Direksi; |  |  |  |
| 1. anggota Dewan Komisaris; dan/atau |  |  |  |
| 1. anggota DPS, |  |  |  |
| wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS harus disampaikan Direksi dengan melampirkan dokumen salinan akta RUPS atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedelapan |  |  |  |
| Sertifikasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 58 | Cukup jelas. |  |  |
| Direksi dan Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pergadaian atau keuangan dari lembaga sertifikasi profesi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesembilan |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 59 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 26 ayat (6), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58, dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Pertama |  |  |  |
| Penaksir |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 60 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Jaminan pada setiap kantor cabang. |  |  |  |
| 1. Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada kantor cabang lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 61 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peningkatan kompetensi dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia secara berkesinambungan. | Penyelenggaraan pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan oleh internal Perusahaan dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia Perusahaan pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Perusahaan. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan penyediaan dana untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia Perusahaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai besaran penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 62 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), dan/atau Pasal 61 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| PENYELENGGARAAN USAHA |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Kegiatan Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 63 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kegiatan usaha utama Perusahaan dilakukan melalui penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai. |  |  |  |
| 1. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu: |  |  |  |
| 1. penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; |  |  |  |
| 1. pelayanan jasa titipan barang berharga; |  |  |  |
| 1. pelayanan jasa taksiran; |  |  |  |
| 1. kegiatan lain yang tidak terkait Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau |  |  |  |
| 1. kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Pelayanan jasa titipan barang berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang berupa emas. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 64 |  |  |  |
| Perusahaan wajib memiliki rasio minimum penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sebesar 80% terhadap total Pinjaman. | Pinjaman yang diberikan mencakup kegiatan usaha berupa penyaluran Pinjaman berdasarkan hukum Gadai, penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum fidusia, dan penyaluran Pinjaman melalui kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 65 |  |  |  |
| Perusahaan yang menyalurkan Pinjaman berdasarkan hukum Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilarang untuk: |  |  |  |
| 1. menggunakan Jaminan; | Yang dimaksud dengan “menggunakan Jaminan” adalah mengambil nilai manfaat atas Jaminan dalam bentuk antara lain dipakai untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan, disewakan, atau dipinjamkan. |  |  |
| 1. menyimpan Jaminan di tempat Nasabah; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. memiliki Jaminan; dan/atau | Cukup jelas. |  |  |
| 1. menggadaikan kembali Jaminan kepada pihak lain. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 66 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a wajib melakukan mitigasi risiko, yang dapat dilakukan dengan: |  |  |  |
| 1. mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit; |  |  |  |
| 1. mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan melalui mekanisme asuransi; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas Jaminan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 67 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e wajib tidak dalam pengenaan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: |  |  |  |
| * 1. kegiatan usaha yang akan dilakukan; dan |  |  |  |
| * 1. hak dan kewajiban para pihak |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Jaminan dan Penaksiran |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 68 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menetapkan Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan. |  |  |  |
| 1. Penetapan Jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan kriteria Jaminan. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai kriteria Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 69 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki tempat penyimpanan Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengasuransikan Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi risiko. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan Jaminan berdasarkan hukum Gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 70 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki pedoman tertulis penaksiran Jaminan. |  |  |  |
| 1. Penaksiran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Penaksir. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 71 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memberikan nilai taksiran atas setiap Jaminan kepada Nasabah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka memenuhi kualitas penaksiran Jaminan, Perusahaan wajib: |  |  |  |
| 1. menyediakan alat penaksir; dan | Yang termasuk dengan “alat penaksir” antara lain air uji emas, timbangan, jarum uji berlian, jarum uji emas, dan batu uji. |  |  |
| 1. menetapkan daftar harga pasar Jaminan yang wajar. | Yang dimaksud dengan “harga pasar Jaminan yang wajar” adalah harga yang berlaku di pasaran setempat. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 72 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi nilai minimum perbandingan antara Pinjaman dan nilai taksiran Jaminan dalam memberikan Pinjaman kepada Nasabah. |  |  |  |
| 1. Nilai minimum perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki Pinjaman yang lebih rendah. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai minimum perbandingan antara Pinjaman dan nilai taksiran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 73 |  |  |  |
| 1. Jangka waktu penyaluran Pinjaman kepada Nasabah dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai paling lama 4 (empat) bulan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Perusahaan dapat melakukan Lelang Jaminan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sebelum pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaminan dapat dijual dengan cara: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nasabah menjual sendiri Jaminannya; atau | Yang dimaksud dengan “Nasabah menjual sendiri Jaminannya” adalah Nasabah membawa calon pembeli kepada Perusahaan, tidak dengan membawa keluar Jaminan dari penguasaan Perusahaan. |  |  |
| 1. Nasabah memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menjualkan Jaminannya, | Cukup jelas. |  |  |
| berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan dengan Nasabah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan bersepakat dengan Nasabah untuk melakukan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penjualan dimaksud dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kesepakatan antara Perusahaan dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dimuat dalam Surat Bukti Gadai. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penjualan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban Nasabah terhadap Perusahaan. | Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari Perusahaan tidak berupaya untuk mendapatkan calon pembeli dengan harga yang wajar, yang berakibat merugikan Nasabah. |  |  |
| 1. Jaminan yang dijual oleh Nasabah sebelum tanggal Lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan atau pegawainya. | Yang dimaksud dengan membeli secara langsung adalah dengan cara Perusahaan atau pegawainya membeli Jaminan langsung dari Nasabah.  Yang dimaksud dengan membeli secara tidak langsung adalah dengan cara menggunakan pihak lain sebagai perantara yang mewakili kepentingan Perusahaan atau pegawainya atau membeli secara langsung Jaminan milik Nasabah dari pihak lain. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki pedoman tertulis untuk melakukan penjualan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 74 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Nasabah telah melunasi Pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil, Perusahaan wajib mengembalikan Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama dengan saat penyerahan Jaminan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, Perusahaan wajib mengganti dengan: |  |  |  |
| 1. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Jaminan pada saat Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk Jaminan berupa perhiasan; atau |  |  |  |
| 1. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Jaminan pada saat Jaminan tersebut dijaminkan, untuk Jaminan selain perhiasan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 75 |  |  |  |
| Syarat dan tata cara penjualan Jaminan berdasarkan hukum Gadai dengan cara Lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. | Yang dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlelangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 76 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mengembalikan Uang Kelebihan dari hasil penjualan Jaminan dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 atau berdasarkan kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b kepada Nasabah. | Jaminan adalah milik Nasabah sehingga apabila hasil penjualan Jaminan dengan cara Lelang atau kuasa menjual telah digunakan untuk melunasi kewajiban Nasabah kepada Perusahaan dan masih terdapat Uang Kelebihan, Uang Kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada Nasabah. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib mencatat secara terpisah Uang Kelebihan dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Yang dimaksud dengan “mencatat secara terpisah” adalah membuat akun tersendiri dalam laporan keuangan. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Uang Kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Perjanjian |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 77 |  |  |  |
| 1. Seluruh perjanjian antara Perusahaan dengan Nasabah wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk: |  |  |  |
| 1. Surat Bukti Gadai; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Surat Bukti Fidusia; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat bukti penitipan. | Surat bukti penitipan adalah perjanjian Perusahaan dengan Nasabah atas pelayanan jasa penitipan barang berharga |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 78 |  |  |  |
| 1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memuat paling sedikit: |  |  |  |
| * 1. identitas para pihak; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. nomor dan tanggal perjanjian; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. jenis kegiatan usaha; | Jenis kegiatan usaha adalah penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai atau penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia |  |  |
| * 1. barang yang dijaminkan; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. nilai barang yang dijaminkan; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. jumlah Pinjaman; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. jangka waktu Pinjaman; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. tingkat bunga Pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil, dan biaya administrasi; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. denda keterlambatan; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. klausul pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek secara jelas, apabila penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. ketentuan pemberian peringatan dalam hal Nasabah wanprestasi; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. ketentuan eksekusi atau penjualan Jaminan dalam hal Nasabah wanprestasi. | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. ketentuan mengenai mekanisme pelunasan Pinjaman dan pengembalian Uang Kelebihan dari hasil penjualan Jaminan atau klaim asuransi; | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. jangka waktu dalam hal Perusahaan melakukan mitigasi risiko dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dan huruf c, apabila penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; dan | Cukup jelas. |  |  |
| * 1. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 79 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyerahkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) kepada Nasabah. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyimpan salinan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap transaksi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Pemasaran Digital |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 80 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan sesuai dengan lingkup wilayah usaha. |  |  |  |
| 1. Kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: |  |  |  |
| 1. kegiatan pemasaran; |  |  |  |
| 1. aplikasi permohonan Pinjaman; dan/atau |  |  |  |
| 1. pemantauan pembayaran angsuran. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 81 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi wajib memiliki: |  |  |  |
| 1. prosedur operasional standar terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi; |  |  |  |
| 1. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi ; dan |  |  |  |
| 1. memiliki mitigasi risiko dan sistem teknologi informasi yang andal dan aman. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 82 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan wajib melaporkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pertama kali kegiatan usaha pemanfaatan teknologi informasi dilakukan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 83 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 69 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (7), Pasal 73 ayat (8), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan/atau Pasal 82 dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII |  |  |  |
| PENYELENGGARAAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 84 |  |  |  |
| Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), wajib menggunakan akad dengan ketentuan: |  |  |  |
| 1. memenuhi prinsip keadilan (‘*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*); | Yang dimaksud dengan prinsip keadilan (*‘adl*) adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.  Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan (*tawazun*) adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.  Yang dimaksud dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.  Yang dimaksud dengan prinsip universalisme (*alamiyah*) adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). |  |  |
| 1. tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram; dan | Yang dimaksud dengan “*gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.  Yang dimaksud dengan “*maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil.  Yang dimaksud dengan “*riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).  Yang dimaksud dengan “*zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.  Yang dimaksud dengan “*risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi. |  |  |
| 1. tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 85 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian wajib membentuk unit usaha syariah. |  |  |  |
| 1. Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Unit Usaha Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf Kesatu |  |  |  |
| Penyelenggaraan Unit Usaha Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 86 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, wajib: |  |  |  |
| 1. mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| 1. mempunyai pembukuan terpisah untuk unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib sebesar: |  |  |  |
| Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk unit usaha dari Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; |  |  |  |
| Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) untuk unit usaha dari Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha provinsi; atau |  |  |  |
| Rp100.000.000.000 (serratus miliar rupiah) untuk unit usaha dari Perusahaan Pergadaian dengan lingkup wilayah usaha nasional. |  |  |  |
| 1. Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah disetor penuh pada bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dalam bentuk deposito berjangka. |  |  |  |
| 1. Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib: |  |  |  |
| * + 1. diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian; |  |  |  |
| * + 1. tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| * + 1. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 87 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Direksi Perusahaan Pergadaian harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| * 1. anggaran dasar Perusahaan Pergadaian yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  |
| * 1. fotokopi bukti setoran modal kerja yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin unit usaha syariah; |  |  |  |
| * 1. surat keputusan RUPS atau rapat anggota atau Direksi yang membuktikan menyetujui penempatan modal kerja pada unit usaha syariah disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya; |  |  |  |
| * 1. dokumen DPS, meliputi: |  |  |  |
| 1. keputusan RUPS atau rapat anggota mengenai pengangkatan DPS; dan |  |  |  |
| 1. surat rekomendasi DPS atau bukti sertifikasi pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; |  |  |  |
| * 1. dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi: |  |  |  |
| 1. surat keputusan Direksi Perusahaan Pergadaian mengenai pengangkatan pimpinan unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. surat pernyataan dari pimpinan unit usaha syariah dan diketahui oleh Direksi Perusahaan Pergadaian yang menyatakan bahwa pimpinan unit usaha syariah tidak rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup pimpinan unit usaha syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; |  |  |  |
| * 1. contoh Surat Bukti Gadai atau Surat Bukti Fidusia yang akan digunakan; dan |  |  |  |
| * 1. rencana kerja unit usaha syariah yang akan dibuka untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat: |  |  |  |
| 1. sistem dan prosedur kerja; |  |  |  |
| 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; dan |  |  |  |
| 1. proyeksi arus kas bulanan serta asumsi yang mendasarinya. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang disampaikan tidak lengkap, Perusahaan Pergadaian harus menyampaikan kekurangan dokumen tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan pemohon tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, permohonan persetujuan dinyatakan batal. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 88 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Unit usaha syariah wajib menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan. |  |  |  |
| 1. Unit usaha syariah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen fotokopi Surat Bukti Gadai atau Surat Bukti Fidusia yang telah digunakan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal unit usaha syariah tidak menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin unit usaha syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 89 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian dapat menghentikan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha unit usaha syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan: |  |  |  |
| 1. tidak merugikan kepentingan Nasabah; |  |  |  |
| 1. memberitahukan kepada Nasabah; dan |  |  |  |
| 1. menyelesaikan kewajiban yang dimiliki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 90 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan pencabutan izin unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. asli salinan keputusan persetujuan izin unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. alasan penutupuan; dan |  |  |  |
| 1. bukti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2). |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Paragraf Kedua |  |  |  |
| Pemisahan Unit Usaha Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 91 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan Pergadaian dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib melakukan Pemisahan unit usaha syariah apabila: |  |  |  |
| 1. unit usaha syariah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; |  |  |  |
| 1. terdapat pemintaan sendiri pemisahaan unit usaha syariah dari Perusahaan Pergadaian; atau |  |  |  |
| 1. atas perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka konsolidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 92 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemisahan unit usaha syariah dapat dilakukan dalam bentuk: |  |  |  |
| 1. pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru; atau |  |  |  |
| 1. pengalihan kepada Perusahaan Pergadaian Syariah lainnya. |  |  |  |
| 1. Prinsip Pemisahan unit usaha syariah harus memenuhi: |  |  |  |
| 1. tidak mengurangi hak Nasabah; |  |  |  |
| 1. dilakukan pada perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; dan |  |  |  |
| 1. tidak menyebabkan Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Pergadaian Syariah hasil pemisahan, atau Perusahaan Pergadaian Syariah yang menerima pengalihan portofolio aset dari unit usaha syariah melanggar ketentuan yang berlaku di pergadaian. |  |  |  |
| 1. Pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengalihan seluruh portofolio Nasabah pada unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian kepada Perusahaan Pergadaian Syariah baru. |  |  |  |
| 1. Pengalihan kepada Perusahaan Pergadaian Syariah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan mengalihkan seluruh portofolio Nasabah pada unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian kepada Perusahaan Pergadaian Syariah yang telah memperoleh izin usaha. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 93 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian wajib melakukan Pemisahan unit usaha syariah dalam hal memenuhi kriteria: |  |  |  |
| 1. nilai aset unit usaha syariah telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset Perusahaan Pergadaian induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |  |
| 1. ekuitas unit usaha syariah telah mencapai paling sedikit sebesar ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. |  |  |  |
| 1. Unit usaha syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemisahan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 94 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a dikecualikan dari ketentuan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada saat pendiriannya. |  |  |  |
| 1. Pemenuhan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dipenuhi dalam jangka 2 (dua) tahun sejak tanggal izin usaha Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 95 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan Pemisahan unit usaha syariah wajib terlebih dahulu: |  |  |  |
| 1. memberitahukan kepada Nasabah atas rencana pemisahan unit usaha syariah; dan |  |  |  |
| 1. mengumumkan rencana pemisahan unit usaha syariah pada situs Perusahaan Pergadaian dan surat kabar harian Indonesia yang berperedaran nasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 96 |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan unit usaha syariah wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. rancangan akta Pemisahan UUS; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rancangan akta pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah unit usaha syariah; | Rencana penyelesaian hak dan kewajiban Nasabah unit usaha syariah memuat paling sedikit:   1. rancangan pemberitahuan rencana pemisahan unit usaha syariah kepada Nasabah; dan 2. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Nasabah. |  |  |
| 1. rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan Pergadaian Syariah baru; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. data pemegang saham selain PSP atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dari Perusahaan Pergadaian Syariah baru; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat pernyataan pemegang saham dari Perusahaan Pergadaian Syariah baru yang menyatakan bahwa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. sumber dana penyertaan tidak berasal dari pinjaman; |  |  |  |
| 1. sumber dana penyertaan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; dan |  |  |  |
| 1. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. visi, misi, dan strategi bisnis; |  |  |  |
| 1. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: |  |  |  |
| 1. rencana kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. rencana permodalan; |  |  |  |
| 1. rencana pendanaan; |  |  |  |
| 1. rencana pengembangan kantor cabang; |  |  |  |
| 1. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan |  |  |  |
| 1. rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; |  |  |  |
| 1. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan atas: |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan; |  |  |  |
| 1. laporan laba rugi komprehensif; dan |  |  |  |
| 1. laporan arus kas, |  |  |  |
| beserta asumsi yang digunakan; |  |  |  |
| 1. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan |  |  |  |
| 1. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Penaksir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan Pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah baru. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 97 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan Pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pergadaian dan kegiatan usaha pergadaian berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (2); |  |  |  |
| 1. pemeriksaan pemenuhan ketentuan permodalan; |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan unit usaha syariah; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pergadaian Syariah. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan Pergadaian dan/atau Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan unit usaha syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan Pemisahan unit usaha syariah disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana Pemisahan unit usaha syariah kepada Perusahaan Pergadaian yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan Pemisahan unit usaha syariah ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 98 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana Pemisahan unit usaha syariah dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan rencana Pemisahan unit usaha syariah yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 99 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian yang melakukan Pemisahan unit usaha syariah wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. salinan akta Pemisahan unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian badan hukum, paling sedikit harus memuat: |  |  |  |
| 1. nama dan tempat kedudukan; |  |  |  |
| 1. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. modal disetor; |  |  |  |
| 1. kepemilikan; dan |  |  |  |
| 1. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS; |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS atas Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan unit usaha syariah yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti pelunasan modal disetor Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan unit usaha syariah dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham; |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti penempatan modal disetor Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan unit usaha syariah dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pergadaian Syariah yang bersangkutan, jika terdapat setoran modal dari pemegang saham; |  |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan unit usaha syariah; |  |  |  |
| 1. bukti kesiapan infrastuktur dari Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf l; dan |  |  |  |
| 1. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); |  |  |  |
| 1. mencabut izin pembentukan unit usaha syariah dalam hal permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan unit usaha syariah disetujui; dan |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil Pemisahan unit usaha syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 100 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan Pergadaian Syariah baru hasil pemisahan unit usaha syariah wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan unit usaha syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 101 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (2), Pasal 86 ayat (4), Pasal 88 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 91, Pasal 93, Pasal 94 ayat (2), Pasal 95, Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), dan/atau Pasal 100, dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VIII |  |  |  |
| TINGKAT KUALITAS PIUTANG PINJAMAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Tingkat Kualitas Piutang Pinjaman Berdasarkan Hukum Gadai dan Berdasarkan Fidusia |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 102 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melakukan penilaian kualitas piutang Pinjaman berdasarkan hukum gadai dan/atau Pinjaman berdasarkan fidusia yang disalurkan. |  |  |  |
| 1. Penilaian kualitas piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: |  |  |  |
| 1. lancar; |  |  |  |
| 1. dalam perhatian khusus; |  |  |  |
| 1. kurang lancar; |  |  |  |
| 1. diragukan; dan |  |  |  |
| 1. macet. |  |  |  |
| 1. Penilaian kualitas piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil. |  |  |  |
| 1. Kualitas piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan: |  |  |  |
| 1. lancar apabila apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok Pinjaman dan/atau bunga atau imbal jasa/imbal hasil sampai dengan 10 (sepuluh) hari kalender; |  |  |  |
| 1. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok Pinjaman dan/atau bunga atau imbal jasa/imbal hasil, yang telah melampaui 10 (sepuluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; |  |  |  |
| 1. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok Pinjaman dan/atau bunga atau imbal jasa/imbal hasil, yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender; |  |  |  |
| 1. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok Pinjaman dan/atau bunga atau imbal jasa/imbal hasil, yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; dan |  |  |  |
| 1. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok Pinjaman dan/atau bunga atau imbal jasa/imbal hasil, yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas piutang Pinjaman oleh Perusahaan dengan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas piutang Pinjaman yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melakukan penyesuaian kualitas piutang Pinjaman dengan penilaian kualitas piutang Pinjaman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 103 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menetapkan kualitas piutang Pinjaman yang sama terhadap 1 (satu) Nasabah dengan lebih dari 1 (satu) Pinjaman. |  |  |  |
| 1. Dalam menetapkan kualitas piutang Pinjaman yang sama terhadap 1 (satu) Nasabah dengan lebih dari 1 (satu) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menggunakan kualitas piutang Pinjaman yang paling rendah. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dapat menetapkan kualitas piutang Pinjaman yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) Pinjaman yang dimiliki 1 (satu) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal piutang Pinjaman yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 104 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menjaga kualitas piutang Pinjaman. |  |  |  |
| 1. Piutang Pinjaman yang dikategorikan sebagai piutang Pinjaman bermasalah (*non performing financing*) terdiri dari piutang Pinjaman dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menjaga rasio piutang Pinjaman bermasalah (*non performing finance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang Pinjaman yang telah dibentuk Perusahaan, paling tinggi sebesar 5% (lima persen). |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan langkah: |  |  |  |
| 1. memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penyaluran Pinjaman; |  |  |  |
| 1. memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penilaian kualitas Pinjaman; |  |  |  |
| 1. meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai yang melaksanakan penyaluran Pinjaman; |  |  |  |
| 1. memperbaiki struktur organisasi yang melaksanakan fungsi penyaluran Pinjaman dan administrasi Pinjaman; dan/atau |  |  |  |
| 1. memperbaiki kebijakan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang melaksanakan penyaluran Pinjaman. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Restrukturisasi, Cadangan Penyisihan Penghapusan Piutang Pinjaman, dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 105 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan restrukturisasi piutang Pinjaman. |  |  |  |
| 1. Penerapan kebijakan restrukturisasi piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. |  |  |  |
| 1. Kualitas piutang Pinjaman yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. |  |  |  |
| 1. Perusahaan dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 106 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan piutang Pinjaman. |  |  |  |
| 1. Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar: |  |  |  |
| 1. 1% (satu persen) dari sisa pokok Pinjaman yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi Jaminan; |  |  |  |
| 1. 5% (lima persen) dari sisa pokok Pinjaman yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi Jaminan; |  |  |  |
| 1. 15% (lima belas persen) dari sisa pokok Pinjaman yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi Jaminan; |  |  |  |
| 1. 50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman yang memiliki kualitas diragukan setelah dikurangi Jaminan; |  |  |  |
| 1. 100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi Jaminan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan piutang Pinjaman paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan. |  |  |  |
| 1. Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diperhitungkan sebagai sisa pokok Pinjaman ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang Pinjaman. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 107 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pinjaman sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. |  |  |  |
| 1. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. |  |  |  |
| 1. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan yang tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
| Pasal 108 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1), Pasal 102 ayat (6), Pasal 103 ayat (1), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (3), dan/atau Pasal 107 ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IX |  |  |  |
| BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PINJAMAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Batas Maksimum Pemberian Pinjaman |  |  |  |
| Pasal 109 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan. | Contoh perhitungan BMPP kepada seluruh pihak terkait:  Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2024, PT Gadai DEF memiliki ekuitas senilai Rp1,5 miliar. PT ABC merupakan perusahaan terkait dengan PT Gadai DEF. PT Gadai DEF telah menyalurkan Pinjaman kepada pihak terkait termasuk PT ABC sebesar Rp600 juta. Pada tanggal 7 Mei 2024, PT ABC memperoleh plafon Pinjaman baru senilai Rp200 juta dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:   1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp90 juta; dan 2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 14 Mei 2024 dengan nilai Rp110 juta.   Pada pencairan tahap pertama pada tanggal 7 Mei 2024, PT Gadai DEF tidak melanggar ketentuan BMPP untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2024 Rp1,5 miliar  BMPP untuk seluruh pihak terkait 50% x Rp1,5 miliar = Rp750 juta  Total piutang Pinjaman per 7 Mei 2024 = Rp600 juta + Rp90 juta = Rp690 juta (46% dari nilai ekuitas).  Pada pencairan tahap kedua pada tanggal 14 Mei 2024, PT Gadai DEF melanggar ketentuan BMPP untuk seluruh pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2024 Rp1,5 miliar  BMPP untuk seluruh pihak terkait 50% x Rp1,5 miliar = Rp750 juta  Total piutang Pinjaman per 14 Mei 2024 = Rp600 juta + Rp90 juta +Rp110 juta = Rp800 juta (53,33% dari nilai ekuitas). |  |  |
| 1. Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan sebelum penyaluran Pinjaman dilakukan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila Perusahaan memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| 1. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan; | Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi. |  |  |
| 1. badan usaha di mana Perusahaan bertindak sebagai pengendali; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau |  |  |  |
| 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c; |  |  |  |
| 1. Dewan komisaris atau Direksi pada Perusahaan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal: | Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik horizontal maupun vertikal” adalah pihak sebagai berikut:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; 7. suami atau istri; 8. mertua atau besan; 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 10. kakek atau nenek dari suami atau istri; 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan. |  |  |
| 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau |  |  |  |
| 1. dari Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e; |  |  |  |
| 1. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; | Yang dimaksud dengan “direksi bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi” adalah pihak yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Yang dimaksud dengan “dewan komisaris bagi badan usaha yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi” adalah pihak yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. badan usaha yang dewan komisaris atau direksi merupakan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan; atau |  |  |  |
| 1. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; |  |  |  |
| 1. badan usaha di mana: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris atau Direksi pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau |  |  |  |
| 1. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, bertindak sebagai pengendali; dan |  |  |  |
| 1. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Perusahaan dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 110 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 109 ayat (4) ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perusahaan. | Contoh perhitungan BMPP per 1 (satu) pihak tidak terkait:  Pada tanggal 30 April 2024, PT KLM memiliki nilai total piutang Pinjaman pada PT Gadai XYZ sebesar Rp140 juta. Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2024, PT Gadai XYZ memiliki ekuitas senilai Rp1,5 miliar. PT MAS bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT Gadai XYZ.  Pada tanggal 7 Mei 2024, PT KLM memperoleh plafon Pinjaman baru senilai Rp200 juta dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:   1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp90 juta; dan 2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 14 Mei 2024 dengan nilai Rp110 juta.   Pada pencairan tahap pertama pada tanggal 7 Mei 2024, PT Gadai XYZ tidak melanggar ketentuan BMPP per Nasabah bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:  Ekuitas per 30 April 2024 Rp1,5 miliar  BMPP per Nasabah bukan pihak terkait 20% x Rp1,5 miliar = Rp300 juta  Total piutang Pinjaman per 7 Mei 2022 = Rp140 juta + Rp90 juta = Rp250 juta (16,66% dari nilai ekuitas).  Pada pencairan tahap kedua pada tanggal 14 Mei 2024, PT Gadai XYZ melanggar ketentuan BMPP per Nasabah bukan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut: Ekuitas per 30 April 2024 Rp1,5 miliar  BMPP per Nasabah bukan merupakan pihak terkait 20% x Rp1,5 miliar = Rp300 juta.  Total piutang Pinjaman per 14 Mei 2024 = Rp140 juta + Rp90 juta +Rp110 juta = Rp340 juta (22,66% dari nilai ekuitas). |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perusahaan. | Contoh ketentuan BMPP kepada 1 (satu) kelompok Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait:  Berdasarkan data laporan bulanan per 30 April 2024, PT Gadai XYZ memiliki Ekuitas senilai Rp1,5 miliar. PT MAS bukan merupakan perusahaan terkait dengan PT Gadai XYZ. PT Gadai XYZ juga telah menyalurkan Pinjaman kepada perusahaan lain dalam 1 grup yang terafilisiasi dengan PT MAS sebesar Rp600 juta.  Pada tanggal 7 Mei 2024, PT MAS memperoleh plafon pembiayaan baru senilai Rp200 juta dengan pencairan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:   1. tahap pertama dicairkan pada tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp90 miliar; dan 2. tahap kedua dicairkan pada tanggal 14 Mei 2024 dengan nilai Rp110 miliar.   Pada pencairan tahap pertama pada tanggal 7 Mei 2024, PT Gadai XYZ tidak melanggar ketentuan BMPP kelompok Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:  Ekuitas per 30 April 2022 Rp1,5 miliar.  BMPP kelompok Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait = 50% x Rp1,5 miliar = Rp750 miliar  Total piutang Pinjaman per 7 Mei 2024 = Rp600 juta + Rp90 juta = Rp690 miliar (46% dari nilai Ekuitas).  Pada pencairan tahap kedua pada tanggal 14 Mei 2024, PT Gadai XYZ melanggar ketentuan BMPP kelompok Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait dengan perhitungan sebagai berikut:  Ekuitas per 30 April 2024 Rp1,5 miliar  BMPP kelompok Nasabah yang bukan merupakan pihak terkait = 50% x Rp1,5 miliar = Rp750 juta  Total piutang Pinjaman per 14 Mei 2024 = Rp600 miliar + Rp90 miliar +Rp110 miliar = Rp800 miliar (53,33% dari nilai ekuitas). |  |  |
| 1. Dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan sebelum penyaluran pinjaman dilakukan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila Perusahaan memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) adalah ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nasabah digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Nasabah mempunyai hubungan pengendalian dengan Nasabah lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Nasabah merupakan pengendali Nasabah lain; |  |  |  |
| 1. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Nasabah (*common ownership*); |  |  |  |
| 1. Nasabah memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*) dengan Nasabah lain; |  |  |  |
| 1. Nasabah menerbitkan jaminan (*guarantee*) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Nasabah lain dalam hal Nasabah lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan; dan/atau |  |  |  |
| 1. dewan komisaris dan/atau direksi Nasabah menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Nasabah lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 111 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal: |  |  |  |
| 1. penurunan ekuitas; |  |  |  |
| 1. perubahan nilai tukar; |  |  |  |
| 1. perubahan nilai wajar; |  |  |  |
| 1. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok Nasabah; dan/atau |  |  |  |
| 1. perubahan ketentuan. |  |  |  |
| 1. Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melakukan penyesuaian jika terdapat Pelampauan BMPP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 112 |  |  |  |
| Perusahaan Pembiayaan dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Perusahaan untuk memberikan Pinjaman yang akan mengakibatkan terjadinya Pelanggaran BMPP. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 113 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (5), Pasal 110 ayat (1), Pasal 110 ayat (2), Pasal 111 ayat (3), dan/atau Pasal 112, dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB X |  |  |  |
| PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Penerapan Manajemen Risiko |  |  |  |
| Pasal 114 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. |  |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: |  |  |  |
| 1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; |  |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko; |  |  |  |
| 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan |  |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 115 |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib: |  |  |  |
| 1. menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; | Yang dimaksud dengan “setiap jenjang jabatan” adalah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan semua jabatan lain yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. menetapkan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif; | Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan. |  |  |
| 1. melaksanakan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko Perusahaan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material; | Yang dimaksud dengan “faktor risiko” adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur risiko.  Yang dimaksud dengan “faktor risiko yang bersifat material” adalah faktor risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Perusahaan. |  |  |
| 1. didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko; | Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko” antara lain memiliki sertifikat keahlian dan bukti telah mengikuti pelatihan di bidang sistem informasi Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. melaksanakan sistem pengendalian secara efektif terhadap risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi Perusahaan, | Cukup jelas. |  |  |
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 116 |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 114 ayat (3), dan/atau Pasal 115 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XI |  |  |  |
| PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 117 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko dalam melaksanan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, penilaian Tingkat Kesehatan termasuk terhadap unit usaha syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 118 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan. |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| 1. permodalan; |  |  |  |
| 1. kualitas aset; |  |  |  |
| 1. manajemen; |  |  |  |
| 1. rentabilitas; dan |  |  |  |
| 1. likuiditas; |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tingkat Kesehatan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 119 |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Pasal 117 ayat (2), Pasal 117 ayat (3), dan/atau Pasal 118 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XII |  |  |  |
| PERLINDUNGAN KONSUMEN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 118 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XIII |  |  |  |
| STRATEGI ANTI FRAUD |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 119 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif |  |  |  |
| 1. Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: |  |  |  |
| 1. pencegahan; |  |  |  |
| 1. deteksi; |  |  |  |
| 1. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan |  |  |  |
| 1. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. |  |  |  |
| 1. Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* bagi lembaga jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XIV |  |  |  |
| ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROFILERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 120 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal secara efektif. |  |  |  |
| 1. Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal mencakup: |  |  |  |
| 1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; |  |  |  |
| 1. kebijakan dan prosedur; 2. pengendalian intern; |  |  |  |
| 1. sistem informasi manajemen; dan |  |  |  |
| 1. sumber daya manusia dan pelatihan. |  |  |  |
| 1. Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XV |  |  |  |
| PENGAWASAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 121 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengawasan terhadap Perusahaan dilakukan oleh OJK. |  |  |  |
| 1. Pengawasan terhadap Perusahaan dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan pelaksanaannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XVI |  |  |  |
| PERUBAHAN KEPEMILIKAN, LINGKUP WILAYAH USAHA, DAN ANGGARAN DASAR TERTENTU |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Perubahan Kepemilikan |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 122 |  |  |  |
| 1. Setiap perubahan kepemilikan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan ”perubahan kepemilikan” antara lain:   1. perubahan komposisi saham; 2. pengambilalihan; 3. perubahan modal disetor tanpa mengakibatkan perubahan komposisi saham; dan 4. penambahan pemegang saham baru. |  |  |
| 1. Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS atau rapat anggota setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor, penambahan modal disetor dilarang dilakukan selain dalam bentuk: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. setoran tunai; |  |  |  |
| 1. konversi saldo laba; |  |  |  |
| 1. konversi pinjaman; dan/atau |  |  |  |
| 1. dividen saham. |  |  |  |
| 1. Dalam hal perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal terdapat perubahan PSP. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 123 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilialihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor sesuai dengan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 124 |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. data calon pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. surat pernyataan calon pemegang saham yang menyatakan bahwa: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. sumber dana untuk penyertaan tidak berasal dari pinjaman; |  |  |  |
| 1. sumber dana untuk penyertaan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain; dan |  |  |  |
| 1. fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetor dan akan dilakukan dalam bentuk: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf b; dan/atau |  |  |  |
| 1. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf c; dan/atau |  |  |  |
| 1. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf d; dan |  |  |  |
| 1. bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai. | Penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka sebesar perkiraan nilai penambahan modal disetor. |  |  |
| 1. fotokopi rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf n, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya PSP baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 125 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| * 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1); |  |  |  |
| * 1. analisis kelayakan atas rencana perubahan kepemilikan; |  |  |  |
| * 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, jika perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan; dan |  |  |  |
| * 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pergadaian. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan kepemilikan kepada Perusahaan yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 126 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 127 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang; |  |  |  |
| 1. salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli; |  |  |  |
| 1. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham; |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) huruf a, dalam bentuk: |  |  |  |
| 1. rekening koran Perusahaan; dan |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada: |  |  |  |
| 1. salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian; atau |  |  |  |
| 1. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian Syariah, |  |  |  |
| yang dilegalisasi oleh bank; dan |  |  |  |
| 1. fotokopi laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk: |  |  |  |
| 1. pengalihan saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf b; dan/atau |  |  |  |
| 1. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf c. |  |  |  |
| 1. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) huruf d. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Perubahan Lingkup Wilayah Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 128 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan dapat melakukan perubahan lingkup wilayah usaha. |  |  |  |
| 1. Perubahan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  |
| * 1. peningkatan lingkup wilayah usaha; atau |  |  |  |
| * 1. penurunan lingkup wilayah usaha. |  |  |  |
| 1. Peningkatan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| * 1. rencana peningkatan lingkup wilayah usaha tercantum dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |  |
| * 1. telah mendapatkan persetujuan peningkatan lingkup wilayah usaha dari PSP; |  |  |  |
| * 1. Modal Disetor lingkup wilayah usaha yang dituju; |  |  |  |
| * 1. ekuitas lingkup wilayah usaha yang dituju; |  |  |  |
| * 1. jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan DPS; |  |  |  |
| * 1. Penaksir ; |  |  |  |
| * 1. Tingkat Kesehatan; dan |  |  |  |
| * 1. tidak dalam pengenaan sanksi. |  |  |  |
| 1. Penurunan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| * 1. rencana penurunan lingkup wilayah usaha tercantum dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank; |  |  |  |
| * 1. telah mendapatkan persetujuan penurunan lingkup wilayah usaha dari PSP; dan |  |  |  |
| * 1. Penaksir. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan penurunan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilarang melakukan pengurangan Modal Disetor. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk melakukan penurunan ruang lingkup wilayah usaha dalam rangka menjaga Tingkat Kesehatan Perusahaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 129 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perubahan lingkup wilayah usaha wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan perubahan lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. rencana perubahan anggaran dasar; |  |  |  |
| 1. bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari PSP; dan |  |  |  |
| 1. rencana kerja yang paling sedikit memuat: |  |  |  |
| * + 1. rencana kegiatan usaha Perusahaan dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan |  |  |  |
| * + 1. proyeksi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas bulanan yang dimulai sejak Perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan lingkup wilayah usaha yang baru. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 130 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten/kota, Perusahaan dapat menetapkan pilihan untuk: |  |  |  |
| 1. melakukan peningkatan lingkup wilayah usaha; atau |  |  |  |
| 1. memilih salah satu wilayah provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran sebagai lingkup wilayah usaha. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menetapkan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya pemekaran wilayah. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai perubahan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) dan Pasal 129 ayat (2), mutatis mutandis berlaku terhadap peningkatan lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang menetapkan untuk memilih salah satu wilayah provinsi atau kabupaten/kota hasil pemekaran sebagai lingkup wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. bukti persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha dari PSP; dan |  |  |  |
| 1. peraturan perundang-undangan yang mendasari pemekaran wilayah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 131 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2); |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana perubahan lingkup wilayah usaha; |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pergadaian. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan perubahan lingkup wilayah usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan lingkup wilayah usaha kepada Perusahaan yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan perubahan lingkup wilayah usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Perubahan Anggaran Dasar Tertentu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 132 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan: |  |  |  |
| 1. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan; |  |  |  |
| 1. nama Perusahaan; |  |  |  |
| 1. tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan; dan/atau |  |  |  |
| 1. status Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Perusahaan wajib memenuhi persyaratan dimaksud. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 133 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), Pasal 122 ayat (4), Pasal 122 ayat (5), Pasal 123 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (3), Pasal 128 ayat (4), Pasal 128 ayat (5), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), Pasal 130 ayat (4), Pasal 132 ayat (1), dan/atau Pasal 132 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XVII |  |  |  |
| PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 134 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan dapat melakukan: |  |  |  |
| 1. Penggabungan; atau |  |  |  |
| 1. Peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 135 |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan; |  |  |  |
| 1. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak Nasabah; dan |  |  |  |
| 1. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan Tingkat Kesehatan. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. langkah pelaksanaan; |  |  |  |
| 1. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; dan |  |  |  |
| 1. rencana pemberitahuan kepada Nasabah dan pemangku kepentingan lainnya; |  |  |  |
| 1. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan; | Rancangan akta Penggabungan atau Peleburan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. |  |  |
| 1. rancangan akta pendirian dari Perusahaan hasil Peleburan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan; | Cukup jelas. |  |  |
| 1. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j; dan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 136 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3); |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan; |  |  |  |
| 1. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pergadaian. |  |  |  |
| 1. Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 137 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan Penggabungan yang sebelumnya telah diberikan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 138 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| * 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan; |  |  |  |
| * 1. salinan akta Penggabungan; |  |  |  |
| * 1. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 139 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampiri izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang menerima Penggabungan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 140 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan dalam hal terdapat permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (2); |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha dan/atau izin pembentukan UUS dari Perusahaan yang menggabungkan diri (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan |  |  |  |
| 1. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 141 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh atau dibertahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 142 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri dokumen: |  |  |  |
| 1. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan; |  |  |  |
| 1. salinan akta Peleburan; |  |  |  |
| 1. salinan akta pendirian Perusahaan hasil Peleburan; dan |  |  |  |
| 1. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 143 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Perusahaan hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan dilampiri izin pembentukan UUS terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri. |  |  |  |
| 1. Perusahaan hasil Peleburan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 144 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dan dalam hal terdapat permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: |  |  |  |
| 1. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 142 ayat (2) dan/atau Pasal 143 ayat (2); |  |  |  |
| 1. mencabut izin usaha dan/atau izin pembentukan UUS dari Perusahaan yang meleburkan diri (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan |  |  |  |
| 1. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS. |  |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 145 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan kepada instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Pelaporan pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen berupa anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 146 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Pasal 138 ayat (1), Pasal 138 ayat (3), Pasal 141 ayat (1), Pasal 142 ayat (1), Pasal 143 ayat (3), dan/atau Pasal 145 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XVIII |  |  |  |
| PELAPORAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Penyampaian Laporan Berkala |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 147 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: |  |  |  |
| 1. laporan bulanan; dan |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan. |  |  |  |
| 1. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Perusahaan berupa: |  |  |  |
| 1. profil Perusahaan; |  |  |  |
| 1. laporan keuangan; dan |  |  |  |
| 1. laporan operasional. |  |  |  |
| 1. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 148 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang memenuhi kriteria: |  |  |  |
| 1. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan nasional; dan |  |  |  |
| 1. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang memiliki ekuitas minimum Rp5 miliar, |  |  |  |
| wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. |  |  |  |
| 1. Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan tahun takwim. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan memperoleh izin usaha kurang dari 6 bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 149 |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) wajib disusun dalam mata uang rupiah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. | Ketentuan mengenai pendaftaran akuntan publik mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan lembaga jasa keuangan. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 150 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
| 1. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar: |  |  |  |
| 1. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) per jenis laporan, bagi Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; |  |  |  |
| 1. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per hari kerja dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per jenis laporan, bagi Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha provinsi; atau |  |  |  |
| 1. Rp1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk per hari kerja dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per jenis laporan, bagi Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XIX |  |  |  |
| ASOSIASI |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 151 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi. |  |  |  |
| 1. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang mendapatkan izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan izin usaha |  |  |  |
| 1. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit: |  |  |  |
| * 1. mengkoordinasikan dan menetapkan penyusunan standar praktik dan kode etik Perusahaan; dan |  |  |  |
| * 1. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 152 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dan/atau Pasal 151 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha; |  |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan; dan/atau |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XX |  |  |  |
| PENCABUTAN IZIN USAHA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Pencabutan Izin Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 153 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan: |  |  |  |
| 1. bubar sebagai tindak lanjut atas: |  |  |  |
| 1. keputusan RUPS atau rapat anggota; |  |  |  |
| 1. putusan pengadilan; atau |  |  |  |
| 1. proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang |  |  |  |
| 1. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha; |  |  |  |
| 1. bubar karena melakukan penggabungan atau peleburan; |  |  |  |
| 1. belum melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal izin usaha ditetapkan; atau |  |  |  |
| 1. mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri. |  |  |  |
| 1. Sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya. |  |  |  |
| 1. Prosedur penyelesaian kewajiban oleh Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Nasabah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 154 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata gadai, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pergadaian, dalam nama Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Sejak pencabutan izin usaha Perusahaan, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perusahaan dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Tim Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 155 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian yang dicabut izin usahanya wajib melakukan Likuidasi atau penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha. |  |  |  |
| 1. Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyampaikan dokumen: |  |  |  |
| 1. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan |  |  |  |
| 1. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 156 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) wajib mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Tindakan pendaftaran, pemberitahuan, dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUPS. |  |  |  |
| 1. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: |  |  |  |
| 1. Pembubaran dan dasar hukumnya; |  |  |  |
| 1. nama dan alamat Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. tata cara pengajuan tagihan; dan |  |  |  |
| 1. jangka waktu pengajuan tagihan |  |  |  |
| 1. Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 157 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan/atau tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan: |  |  |  |
| 1. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan; |  |  |  |
| 1. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |  |  |  |
| 1. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  |
| 1. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: |  |  |  |
| 1. Pembubaran dan dasar hukumnya; |  |  |  |
| 1. nama dan alamat Tim Likuidasi; |  |  |  |
| 1. tata cara pengajuan tagihan; dan |  |  |  |
| 1. jangka waktu pengajuan tagihan |  |  |  |
| 1. Seluruh biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban aset Perusahaan dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 158 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan disebut Perusahaan dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “dalam likuidasi” disingkat “(DL)” di belakang nama Perusahaan sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Jangka Waktu Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 159 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: |  |  |  |
| 1. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus dilengkapi dengan: |  |  |  |
| 1. alasan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; |  |  |  |
| 1. laporan perkembangan proses Likuidasi sampai dengan tanggal permohonan beserta bukti pendukungnya; dan |  |  |  |
| 1. rencana kerja dan anggaran biaya selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berakhirnya perpanjangan jangka waktu yang pertama. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat: |  |  |  |
| 1. menunggu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal belum selesainya pelaksanaan Likuidasi sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan adanya gugatan atau sengketa pada aset bermasalah Penyelenggara dalam Likuidasi; atau |  |  |  |
| 1. menetapkan langkah penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Pengawasan dan Pelaporan Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 160 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Pengawasan pelaksanaan atas Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis laporan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan secara langsung pada Perusahaan dalam Likuidasi. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 161 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kelima |  |  |  |
| Pengakhiran Likuidasi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 162 | Cukup jelas. |  |  |
| Pelaksanaan Likuidasi selesai dalam hal: |  |  |  |
| 1. seluruh kewajiban Perusahaan dalam Likuidasi telah dibayarkan; |  |  |  |
| 1. tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi; atau |  |  |  |
| 1. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 163 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal pelaksanaan Likuidasi akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perkiraan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi, Tim Likuidasi wajib mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditor termasuk tindak lanjut apabila kreditor tidak mengambil haknya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. |  |  |  |
| 1. Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. |  |  |  |
| 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang digunakan oleh Perusahaan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal kreditor belum mengambil haknya sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dana yang menjadi hak kreditor tersebut dititipkan pada pengadilan. |  |  |  |
| 1. Penitipan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
| 1. Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada kreditor yang bersangkutan setelah dititipkannya dana yang menjadi hak kreditor yang belum diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |  |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diambil oleh kreditor yang bersangkutan maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XXI |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 164 |  |  |  |
| 1. OJK berwenang menetapkan kebijakan perizinan dan/atau persetujuan Pergadaian. | Termasuk kebijakan perizinan dan/atau persetujuan antara lain berupa pembatasan perizinan atau persetujuan kegiatan Pergadaian. |  |  |
| 1. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: |  |  |  |
| 1. mendukung kebijakan nasional; | Pertimbangan mendukung kebijakan nasional dimaksudkan agar pertumbuhan industri Pergadaian tidak menjadi penghambat bagi kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas terkait. |  |  |
| 1. menjaga kepentingan publik; | Pertimbangan menjaga kepentingan publik dimaksudkan agar industri Pergadaian senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas dengan akses dan kualitas yang sama, serta biaya yang terjangkau. |  |  |
| 1. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau | Pertimbangan menjaga pertumbuhan industri dimaksudkan agar industri dapat tumbuh secara optimal di masyarakat. |  |  |
| 1. menjaga persaingan usaha yang sehat. | Pertimbangan menjaga persaingan usaha yang sehat dimaksudkan agar penyelenggaraan Pergadaian dapat dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum, atau tidak menghambat persaingan usaha. |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 165 |  |  |  |
| Penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XXII |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 166 | Cukup jelas. |  |  |
| Permohonan izin usaha yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 167 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan pemenuhan kewajiban modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib menyesuaikan ketentuan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 168 | Cukup jelas. |  |  |
| Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, wajib melaporkan penetapan PSP dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 169 | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan terkait: |  |  |  |
| * 1. penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); |  |  |  |
| * 1. memiliki Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; |  |  |  |
| * 1. memiliki sertifikasi keahilian di bidang pergadiaan atau keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan |  |  |  |
| * 1. penerapan prinsip Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), |  |  |  |
| * 1. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), |  |  |  |
| wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 170 | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan terkait larangan rangkap jabatan bagi: |  |  |  |
| * 1. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan |  |  |  |
| * 1. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, |  |  |  |
| wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 171 | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan terkait: |  |  |  |
| 1. ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; |  |  |  |
| 1. memiliki Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1); |  |  |  |
| 1. memiliki Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan |  |  |  |
| 1. rasio minimum penyaluran Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, |  |  |  |
| wajib dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pemenuhan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Perusahaan wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan disertai jangka waktu tertentu yang dibutuhkan. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS atau rapat anggota dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
| 1. Perusahaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 172 | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan terkait: |  |  |  |
| 1. kualitas piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1); |  |  |  |
| 1. cadangan penyisihan piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1); |  |  |  |
| 1. cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1); dan |  |  |  |
| 1. BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110, |  |  |  |
| wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2025. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XXIII |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 173 | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5913), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 174 | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5913), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 175 |  |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR |  |  |  |